

**OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

FAIZAL RANGGA KUSUMA

202010110311283

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGAWI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FAIZAL RANGGA KUSUMA
NIM: 202010110311283

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGAWI

Diajukan Oleh:

FAIZAL RANGGA KUSUMA

202010110311283

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Abd. Dr. Poncet, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

FAIZAL RANGGA KUSUMA

202010110311283

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pengaji I : Sumali, SH., M.Hum

Pengaji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAIZAL RANGGA KUSUMA

NIM : 202010110311283

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGAWI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Faizal Rangga Kusuma

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

يُسْرًا الْعُسْرُ مَعَ إِنْ , يُسْرًا الْعُسْرُ مَعَ فَإِنْ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).



ABSTRAK

Nama

: Faizal Rangga Kusuma

NIM

: 202010110311283

Judul

: OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Pembimbing

: Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.

Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi masih belum terlihat optimal, dari tahun ke tahun Fungsi Pembentukan Perda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi selalu mengalami penurunan serta kurang optimal dalam menyelesaikan rancangan peraturan yang telah disusun bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, dan mengetahui dan mengoptimalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan secara langsung pada peristiwa hukum serta menganalisis realitas hukum yang terjadi pada masyarakat, dengan data yang didapatkan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tidak optimal dalam menjalankan fungsi legislasi berdasarkan jumlah inisiatif Perda yang diusulkan dibandingkan Raperda, kemudian faktor yang dinilai menghambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi adalah faktor SDM, kurangnya inisiatif para anggotanya, dan bagaimana kualitas usulannya. Upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi adalah memberikan bimtek peningkatan kapasitas terkait Legislasi dan memperhatikan taraf pendidikan terhadap anggota yang dinilai kurang. Kesimpulannya adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya dalam hal legislasi dan terdapat beberapa faktor yang mendasarinya serta terdapat beberapa upaya untuk mengatasinya. Adapun saran yang diberikan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dapat mengoptimalkan fungsinya dalam membentuk serta merancang Pertaturan Daerah dengan cara meningkatkan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi serta perlu adanya penyelesaian masalah internal dan eksternal yang menghambat jalannya fungsi legislasi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Kata Kunci: Optimalisasi, Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRACT

Name : Faizal Rangga Kusuma
NIM : 202010110311283
Title : OPTIMIZATION OF THE LEGISLATION FUNCTION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF NGAWI DISTRICT

Thesis Guide : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M. Hum

Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

This research is based on the fact that the legislative functions of the People's Representative Council of the District of Ngawi are still not optimum, from year to year, the Perda formation function in the People's Representative Council of the District of Ngawi have always been declining as well as less optimum in completing the draft regulations that have been drawn up jointly. This research aims to find out and study the implementation of the Legislative functions of the People's Representative Council of the District of Ngawi, find out any factors that impede the execution of the Legislative function of the People's Representative Council of the District of Ngawi, and to know and optimize the Council of People's Representatives of the District of Ngawi in the formation of the Regional Regulations. The method used is the field research directly on legal events as well as the analysis of the legal reality that occurs in the community, with data obtained from the Secretariat of the People's Representative Council of the District of Ngawi. The result of this investigation is that the People's Representative Council of the District of Ngawi is not optimum in performing legislative functions based on the number of proposed initiatives of Perda compared to Raperda, then the estimated factors hindering the People's Representative Council of the District of Ngawi are the SDM factors, the lack of initiative of its members, and how the quality of the proposal. The efforts of the People's Representative Council of the District of Ngawi are to provide a boost to the capacity related to the legislation and to pay attention to the level of education of members who are undereducated. The conclusion is that the Council of People's Representatives of the District of Ngawi is not optimum in carrying out its function in terms of legislation and there are several factors underlying it as well as there are some attempts to address it. The advice given to the Council of People's Representative of the District of Ngawi, namely that the Council can optimize its functions in forming and designing the Regional Regulations by increasing the number of draft regional regulations proposed by the members of the Council, as well as the need for the resolution of internal and external problems that hinder the way of the function of legislation within the council.

Keywords: Optimization, Legislative Functions, Regional People's Representative Council.

KATA PENGANTAR

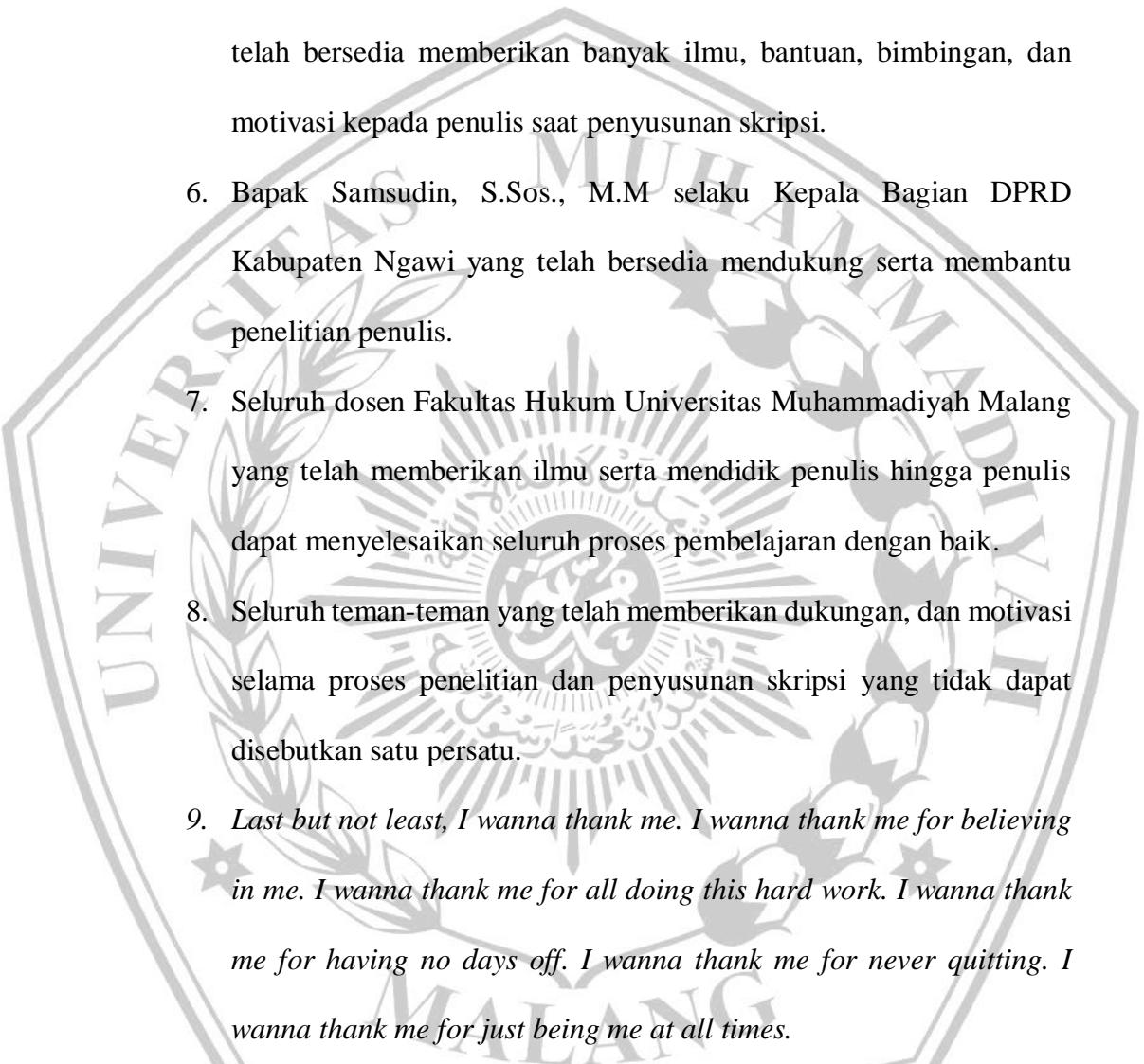
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji, dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI”** Tak lupa juga shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di hari akhir kelak. Proposal tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu karena dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, serta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan bagi seluruh umatnya.
2. Seluruh keluarga, khususnya Bapak Putut Budi Santoso, S.Pd dan ibu Suparmi, S.Pd yang selalu memberikan dukungan baik moral dan materil, serta seluruh doanya. Terima kasih karena selalu ada di setiap prosesnya.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

- 
4. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia memberikan banyak ilmu, bantuan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis saat penyusunan skripsi.
 5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia memberikan banyak ilmu, bantuan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis saat penyusunan skripsi.
 6. Bapak Samsudin, S.Sos., M.M selaku Kepala Bagian DPRD Kabupaten Ngawi yang telah bersedia mendukung serta membantu penelitian penulis.
 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu serta mendidik penulis hingga penulis dapat menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik.
 8. Seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan, dan motivasi selama proses penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 9. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang membangun, dan saran seluas-luasnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi oleh peneliti demi terciptanya proposal tugas akhir yang bermanfaat,

berguna, dan dapat diterima sebagai ide maupun gagasan yang menambah wawasan.

Malang, Juli 2024

Faizal Rangga Kusuma



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Optimalisasi	19
B. Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan	19
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	24
D. Peraturan Daerah.....	28
E. Efektivitas Hukum	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi ..	37
B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.....	45
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.....	56
D. Upaya Yang Dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Peraturan Daerah	59
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*.
- Kusnardi Moh. dan Ibrahim Harmaily, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.
- Kusnardi Muh. dan Bintan R Saragih, 1983, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT Gramedia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik, 2007, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zamzam, F. (2015). Good Governance Sekretariat DPRD. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=-NWRDwAAQBAJ> diakses tanggal 5 Mei 2024

Jurnal

- Agus Dedi, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia’, *Jurnal Moderat*, 7.1 (2021).
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta,2002.
- Elpi Lutpiani, ‘Implementasi Demokrasi Di Indonesia’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021).
- Ias Muhlashin, ‘Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Journal Al-Qadau*, 8.1 (2021).
- Indartini, M., Wibisono, N., & Widjiseno, A. (2019). Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kartiwa, H. A. (2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance”. *Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia*.
- Lalu M. Alwin Ahadi, ‘Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum’, *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022).
- Manan, B. (1994). Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan. *Jakarta*
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*.
- Nabawi, A. N. (2023). Konsep Trias Politica Dan Penerapannya di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*.

- Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi pelayanan E-KTP guna meningkatkan validitas data kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal*, 10.
- Rajab, A., & Undang-Undang, B. (2016). Pengaruh Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/ Kota. *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1).
- Rauf, R. (2016). Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintah Daerah.
- Rosianti, E. E., Hafizd, J. Z., Rana, M., & Sugianto, S. (2024). Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Santoso, R., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1).
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
- Supriarno, S., & Hadi, S. (2019). Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*
- Thalhah, H. M. (2009). Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3).
- Yarni, Meri. "Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 1, Mar. 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ngawi

Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi

Website

Website Resmi DPRD Kabupaten Demak <https://dprd.demakkab.go.id>.

Website Resmi DPRD Kabupaten Ngawi [https://dprd.ngawikab.](https://dprd.ngawikab)

Website Resmi KBBI <https://kbbi.web.id/optimalisasi>.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Faizal Rangga Kusuma
Nim : 202010110311283

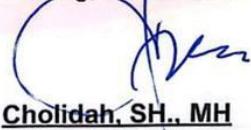
Dengan Judul Skripsi :

“ OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

LOLOS
PLAGIASI



Dipindai dengan CamScanner